

# UNI EROPA: TELAAH KRITIS ANTARA PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN KAWASAN

Denada Faraswacyen L. Gaol<sup>1</sup>

[denada.faraswacyen@budiluhur.ac.id](mailto:denada.faraswacyen@budiluhur.ac.id)

## **Abstract**

*The purpose of this paper is to critically examine the tendency of some countries to step out of EU membership, especially after UK exits from EU membership after the referendum process. To that end, the authors argue that the condition represents the reality that the significance of current national interest is more than the importance of integration in the region. The problem is studied using several concepts such as neorealism and national interest. The result of the analysis by the authors shows that the issue of nationalism tends to be stronger than the integration issue. The EU focuses more on expanding membership rather than on strengthening the implementation of the various agreements that have been made. The basic purpose of EU establishment has the potential to shift due to the behavior of prioritizing EU arrogance over the achievement of the ideals contained in the Maastricht Treaty. Therefore, it can be concluded that political factors are still dominant in decision making in the EU. The less than optimal embodiment of the Maastricht Treaty has led to the emergence of several countries' options to get out of the EU. They perceive that their national interests were not accommodated through European integration.*

**Kata kunci:** *European Union, integration, national interest.*

## **Pendahuluan**

Uni Eropa merupakan salah satu wujud integrasi berdasarkan berdasarkan kawasan yang terletak di Eropa dan salah satu organisasi yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Sejak terbentuk Uni Eropa terus melanjutkan agenda perluasan keanggotaan (*enlargement agenda*) hingga ke Eropa Timur dan dan Eropa Tenggara. Negara-negara anggota Uni Eropa yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat secara politik dan ekonomi merupakan negara yang cukup stabil dan mapan. Agenda perluasan yang awalnya merujuk pada konsep integrasi hingga ke wilayah timur dan tenggara secara langsung dan tidak langsung berdampak pada keberlangsungan ekonomi, politik, dan sosial negara anggota.

---

<sup>1</sup> Dosen pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Uni Eropa merupakan organisasi kawasan yang sejak tahun 2007 telah memiliki keanggotaan sebanyak 27 negara di kawasan Eropa. Pada tahun 2004, Uni Eropa menerima secara resmi beberapa negara Eropa Timur dan Selatan ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Penambahan tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Uni Eropa. Dampak dari perluasan keanggotaan adalah semakin meningkatnya persaingan antarnegara di dunia maupun di Eropa itu sendiri dalam berbagai sektor. Seluruh negara anggota Uni Eropa terikat dengan serangkaian perjanjian yang telah disepakati bersama (Michelle Cini. 2003. *Union European Politics*. New York: Oxford University Press). Kebijakan Uni Eropa meliputi berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa meyakini bahwa kebijakan Uni Eropa dapat memberikan implikasi positif terhadap pembangunan negara-negara tersebut.

Namun demikian, tidak semua negara di Eropa bersedia bergabung di dalam Uni Eropa. Terdapat beberapa negara seperti Swiss, Swedia ataupun Norwegia yang hingga kini belum menunjukkan minatnya bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Hal tersebut memperlihatkan tidak semua negara Eropa memiliki pandangan/keyakinan bahwa semua kebijakan Uni Eropa akan berdampak positif bagi kepentingan nasional mereka. Beragam isu yang berkembang belakangan ini di Eropa, antara lain isu pengungsi, terorisme, pelambatan ekonomi, dan lain-lain berpengaruh terhadap cara pandang negara-negara anggota Uni Eropa terhadap persepsi ancaman dan pencapaian kepentingan nasional setiap negara. Untuk itu, kecenderungan yang mengemuka saat ini adalah implementasi integrasi Uni Eropa berpotensi mengalami hambatan dikarenakan negara-negara anggota mulai mengedepankan pencapaian kepentingan nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan negara-negara anggota Uni Eropa yang mulai mengedepankan pencapaian kepentingan nasional berhadapan dengan pencapaian kepentingan bersama di kawasan. Hal tersebut distimulasi oleh munculnya persepsi ancaman dan isu yang berkembang di kawasan.

## **Kerangka Pemikiran**

### *Kepentingan Nasional*

Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai-nilai yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial yang dimiliki oleh negara. Selain itu, kepentingan nasional menjadi tujuan mendasar dan faktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Daniel S. Papp

mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideology, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas (Daniel S. Papp, 1988, *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*, 2<sup>nd</sup> ed. MacMillan Publishing Company: New York, hal. 29)

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang sangat vital bagi negara karena menjadi tujuan mendasar dan faktor menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional dijadikan tolok ukur bagi pengambil keputusan negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional serta diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional (T. May Rudy. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika Aditama: Bandung, hal. 116). Dengan demikian, dalam mewujudkan kepentingan nasional, suatu negara berusaha melindungi dan mempertahankan dirinya dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan suatu negara.

### *Regionalisme*

Regionalisme didasari oleh perdamaian, keamanan dan pembangunan. Regionalisme juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan antarnegara yang letak geografisnya berdekatan dan latar belakang sejarah yang sama. Pengertian *regionalism* mengacu pada kerja sama transnasional dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial di wilayah tersebut. Untuk itu, *regionalism* mengacu pada upaya memperkuat hubungan antarnegara (Artatrana Gochhayat, 2014. *Regionalism and Sub Regionalism: A Theoretical Framework with Special Reference to India*. Academic Journal, African Journal of Political Science and International Relations. Vol. 8 (1), hal. 10 – 11)

Sejarah munculnya *regionalism* ditandai oleh dua faktor:

1. Melihat faktor daya ikat yang membuat negara-negara tertarik untuk melakukan kerja sama regional.
2. Melihat lahirnya sebuah institusi regional sebagai wujud dari kerja sama regional di suatu kawasan tertentu (Nuraeni S, dkk. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal. 16)

Dengan adanya proses *regionalism*, maka secara otomatis terjadi integrasi. Integrasi merupakan suatu kondisi ketika dominasi sistem politik yang lebih besar menjadi semakin

meningkat dengan adanya penambahan unit-unit baru. Menurut Ernest B. Haas integrasi internasional didefinisikan sebagai kondisi ketika aktor-aktor politik internasional diminta untuk mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat yang memiliki atau mengambil alih yurisdiksi dari negara bangsa (Ernst B. Haas. 1958. *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Force in 1950 – 57*. Stamford, California: Stamford University Press, hal. 139)

Sedangkan menurut Martin Griffiths, integrasi didefinisikan dalam empat hal, yakni:

1. Pergerakan menuju pergerakan kerjasama antarnegara.
2. Transfer otoritas kepada institusi supranasional.
3. Peningkatan penyamaan nilai.

Perubahan menuju masyarakat global untuk membentuk masyarakat politik yang baru (Martin Griffiths and Terry O'Callaghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. New York: Routledge).

## **Pembahasan**

### *Terbentuknya Uni Eropa*

Uni Eropa adalah organisasi kawasan yang bergerak di bidang politik dan ekonomi, dengan jumlah anggota 28 negara Eropa. Sebagai sebuah organisasi, Uni Eropa didasarkan kepada sebuah aturan dan hukum yang mengikat. Pasca Perang Dunia II, Jean Monnet dari Perancis membuat sebuah rencana untuk pengendalian hasil sumber daya batu bara dan baja milik Perancis dan Jerman. Belgia, Perancis, Italia, Luxemburg, Belanda, dan Jerman menandatangani Perjanjian Paris pada 18 April 1951. Perjanjian tersebut merupakan awal diresmikannya pembentukan *European Coal and Steel Community (ECSC)* yang mulai berlaku pada 23 Juli 1952 (James Maxine and Matthew Purvis. 2014. *The European Union*. House of Lords Library Notes. London: LLN, hal. 1 – 2).

Dalam perkembangannya *ECSC* menjadi organisasi regional yang sukses sehingga membuat negara anggota optimis untuk membentuk sebuah organisasi regional di benua Eropa. Pada tahun 1957, negara anggota *ECSC* membentuk *European Economic Community (EEC)* yang didasarkan pada Perjanjian Roma. Melalui *EEC* juga diharapkan dapat meningkatkan integrasi Eropa. Tepatnya pada 7 Februari 1992 disepakatilah perubahan dari *European Community* menjadi *European Union* (Uni Eropa). Kesepakatan tersebut ditandatangani di Maastricht, dan mulai berlaku 1 November 1993. Negara anggota bersepakat untuk memberikan wewenang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk

memutuskan ketentuan-ketentuan melalui mekanisme *co-decision procedure*. Dengan demikian, organisasi regional Uni Eropa secara resmi terbentuk pada 1992, dan hingga saat ini masih memikat banyak negara Eropa untuk bergabung ke dalamnya.

### *Perkembangan Isu di Eropa*

#### *Krisis Pengungsi*

Krisis pengungsi terjadi akibat datangnya hampir satu juta pencari suaka dari berbagai negara yang sedang mengalami konflik seperti Suriah, Afganistan, Libya dan Irak ke daratan Eropa. Sikap negara-negara Uni Eropa dalam merespon gelombang migran menimbulkan pertentangan. Pertentangan terjadi berkaitan dengan jumlah kuota pengungsi yang dapat diterima, serta terjadinya penolakan penerimaan pengungsi dari beberapa negara. Pembentukan Uni Eropa tidak didesain untuk menghadapi permasalahan pengungsi. Oleh karena itu, krisis ini akan menjadi tantangan bagi Uni Eropa. Apabila permasalahan tersebut tidak mampu dicarikan solusi terbaik, maka berpotensi besar untuk memecah Uni Eropa.

Gelombang pengungsi besar-besaran dari Timur Tengah dan Afrika dapat berakibat pada krisis kemanusiaan dan keamanan. Dengan demikian, permasalahan pengungsi ini mulai menyadarkan beberapa negara Uni Eropa tentang strategisnya pencapaian dan menjaga kepentingan nasional negara. Perbedaan pandangan di Uni Eropa terkait penanganan masalah pengungsi, menunjukkan bahwa beberapa negara Uni Eropa mulai mengedepankan kepentingan nasional mereka di atas kepentingan kawasan.

#### *Perluasan Keanggotaan*

Uni Eropa termasuk organisasi regional yang berkembang sangat maju. Namun demikian bukan berarti Uni Eropa tanpa masalah. Terkait dengan isu-isu tertentu, terkadang pandangan para anggota dapat berseberangan secara tajam. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda di antara negara-negara anggota, Uni Eropa telah berhasil menjalankan kerja sama kawasan dengan baik. Banyak kesepakatan bersama yang telah dihasilkan. Sejak terbentuk, Uni Eropa memiliki daya pikat yang sangat menarik bagi banyak negara untuk bergabung.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa dapat berdampak positif maupun negatif. Secara positif perluasan keanggotaan dapat memperluas akses perdagangan dan potensi pasar. Sedangkan sisi negatifnya, banyak kebijakan negara anggota yang harus disesuaikan

dengan kesepakatan yang telah ditandatangani di Uni Eropa. Perkembangan Uni Eropa selama ini menjadi contoh ideal bagi wujud integrasi kawasan. Akan tetapi, semakin kuatnya organisasi tersebut justru melemahkan proses demokratisasi di Eropa. Banyak kebijakan yang diambil ditentukan oleh elit para pengambil keputusan, tanpa banyak melibatkan peran serta publik.

## **Penutup**

Berikut ini simpulan yang dapat dihasilkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis, meliputi beberapa hal:

1. Uni Eropa sebagai wujud integrasi di kawasan Eropa telah menjadi contoh bagi kerja sama regional yang ideal.
2. Namun demikian, Uni Eropa tetap memiliki sisi kelemahan dan mulai dirasakan oleh para anggotanya ketika muncul beragam isu yang bertentangan dengan kepentingan nasional setiap negara.
3. Munculnya beragam isu yang melanda Uni Eropa merupakan ujian berat bagi para anggotanya. Kemampuan negara-negara anggota Uni Eropa dalam mengelola isu serta mencari jalan keluarnya akan berpengaruh terhadap soliditas di dalam Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa harus memiliki kemampuan untuk menegosiasikan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara dan kepentingan bersama di kawasan.

## **Daftar Pustaka**

- Cini, Michelle. 2003. *Union European Politics*. New York: Oxford University Press.
- Gochhayat, Artatrana. 2014. *Regionalism and Sub Regionalism: A Theoretical Framework with Special Reference to India*. Academic Journal, African Journal of Political Science and International Relations. Vol. 8 (1).
- Griffiths, Martin and Terry O' Callaghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. New York: Routledge.
- Haas, Ernst B. 1958. *The Uniting of Europe: Political, Social, And Economic Force in 1950 – 57*. Stamford, California: Stamford University Press.
- Maxine, James and Matthew Purvis. 2014. *The European Union*. House of Lords Library Notes. London: LLN.
- Nuraeni S, dkk. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Papp, Daniel S. 1988. *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*, 2<sup>nd</sup> ed. MacMillan Publishing Company: New York.

Rudy, T. May. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika Aditama: Bandung.